

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Tahun 2011-2014

¹Lulu Indah Utami, ²Nurfahmiyati, SE., M.Si, ³Ria Haryatiningsih, SE., MT

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email : ¹Luluindah_u@yahoo.com,

Abstract, Poverty is a problem in Indonesia including in West Java region. In West Java poverty becomes a problem that concerns many aspects such as education, health, income, etc. This study aims to analyze the factors that affect the level of poverty in West Java. The variable used including population growth, economic growth rate, and human development index in 2011-2014. The data used are secondary data from 26 districts/cities in West Java of 2011-2014 period and the data are processed by using panel data analysis. The analysis technique of this research is done by finding there gressi one quation and the coefficient of determination (R^2). The result of there search with 5% sign if icance shows that population growth variable has positive and sign if icant influence to wards poverty level of West Java region, economic growth rate has negative and sign if icant influenceto wards poverty level of West Java region, and HDI has negative and in significant influence to wards poverty level of West Java region.

Keywords : The Level of Poverty, Residents, LPE, IPM

ABSTRAK, Kemiskinan merupakan masalah bagi Indonesia termasuk wilayah Jawa Barat. Di Jawa Barat kemiskinan menjadi masalah yang menyangkut banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan wilayah Jawa Barat. Variabel yang digunakan meliputi pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia tahun 2011-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat periode tahun 2011-2014 dan data diolah dengan menggunakan analisis data panel. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian dengan signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan wilayah Jawa Barat, dan IPM mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan wilayah Jawa Barat.

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, LPE, IPM

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia, termasuk juga Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Agar mendapatkan solusi untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan yang cukup rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Letak geografis Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Ibukota yang merupakan pusat pemerintah dan ekonomi nasional yang dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan, dan permodalan. Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang unggul, tetapi data BPS menunjukkan tingkat kemiskinannya jauh dari angka kemiskinan Ibukota dengan 3,64% pada tahun 2011, sedangkan Jawa Barat tingkat kemiskinannya 10,57% tahun 2011.

Selain itu, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 46,7 juta jiwa pada tahun 2014 dan meningkat setiap tahunnya. Menurut teori Malthus pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis (Todaro, 2011:347-348). Tetapi Provinsi

Jawa Barat dengan kondisi tersebut tingkat kemiskinannya secara agregat mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2011-2014.

Lain halnya dengan LPE Jawa Barat tahun 2011-2014 yang cenderung mengalami penurunan, dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2011-2014 tingkat kemiskinan ikut menurun. Sedangkan tahun 2011-2014 angka IPM Jawa Barat selalu mengalami peningkatan, jika dilihat dari masing-masing komponen IPM juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2011-2014 yang sama-sama mengalami peningkatan.

Telah dipaparkan sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, diantaranya pertumbuhan penduduk, LPE, dan IPM. Untuk itu perlu dicari bagaimana pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Jawa Barat, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, LPE dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

B. Landasan Teori

Definisi Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2006:72) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan timpang atau sangat tidak merata; 20 persen penduduk yang paling kaya menerima 5 hingga 10 kali lipat pendapatan yang diterima oleh 40 persen golongan yang paling miskin.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Selain itu, tingkat kegagalan penyelesaian pendidikan relative tinggi, sedangkan tingkat melek huruf masih sangat rendah.

Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) menuliskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta

kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Robert Cassen (Todaro, 2006:351) sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk bukan merupakan penyebab utama rendahnya taraf hidup masyarakat, kesenjangan pendapatan atau terbatasnya kebebasan dalam membuat pilihan yang merupakan masalah pokok dalam suatu negara.
2. Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materil.
3. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat, meskipun bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari hal itu merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara.

Todaro dan Smith (2006:349) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional.

Laju Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Menurut Kuznets (Todaro, 2003:99).

Menurut Kuznets (Jhingan,2008:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan tiga cara:

1. Pertumbuhan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. “pendapatan nasional nyata” menunjuk pada keseluruhan output barang-barang jadi dan jasa dari negara itu dalam arti nyata ketimbang dalam arti uang.
2. Definisi kedua, berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Prof Meier mendefinisikan “proses kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang”. Prof. Baran membenarkan “pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan output perkapita barang-barang material dalam suatu jangka waktu”. Definisi di atas bermaksud menekankan bahwa bagi pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk.
3. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan pertumbuhan ekonomi dari titik-titik kesejahteraan ekonomi. Umpama, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Angka pendapatan perkapita adalah konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara termasuk kemiskinan. Konsep itu sendiri merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur besar-kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan (Todaro, 2003:56).

Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

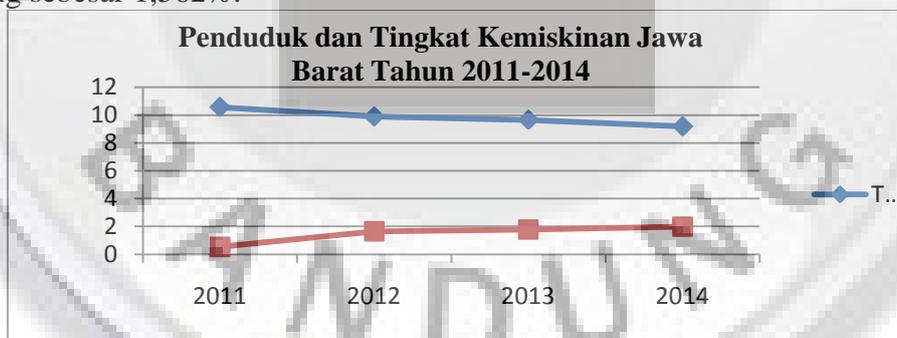
Menurut (Todaro, 2011:57) indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Sesuai dengan pengertian indeks pembangunan manusia yang telah di jelaskan sebelumnya, indeks pembangunan manusia merupakan bagian dari pembangunan suatu negara. Masing-masing komponen dari indeks pembangunan manusia yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan. komponen indeks pembangunan manusia diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

C. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian. Penulis menggunakan analisis data panel dengan data *cross-section* yang mencakup 26 kabupaten/kota di Jawa Barat dan data *time-series* yang mencakup periode 2011-2014 sehingga jumlah data observasi secara keseluruhan sebanyak 104 observasi. Selain itu, akan dibahas pula mengenai analisis statistika dan asumsi klasik, sedangkan analisis ekonomi dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap hasil analisis estimasi model berdasarkan teori-teori yang ada.

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi yang negatif. Adapun besarnya nilai koefisien dari jumlah penduduk adalah sebesar -1,562 Artinya setiap ada penambahan penduduk sebesar 1% maka Tingkat Kemiskinan akan berkurang sebesar 1,562%.



Gambar 1. Penduduk dan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2011-2014

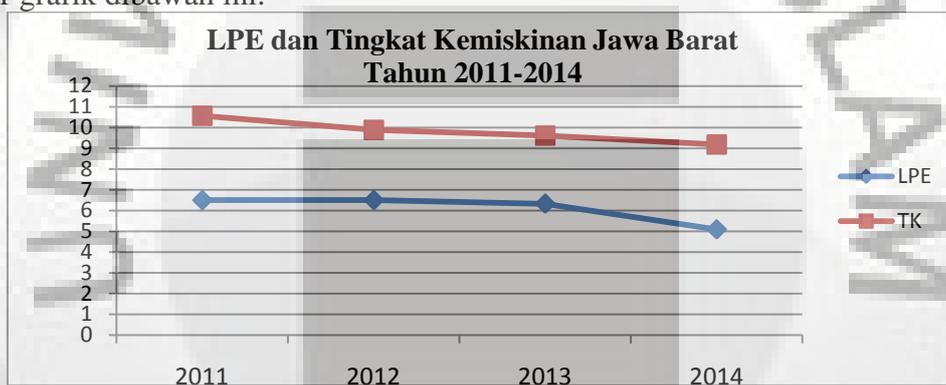
Grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014. Hal tersebut dapat terlihat pada Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 sebesar 1,98% dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 1,78%. Peningkatan penduduk tersebut diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,18% dan menunjukkan penurunan sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2013 sebesar 9,61%.

Fenomena peningkatan penduduk ini disebabkan oleh adanya fertilitas dan migrasi pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Salah satunya dari wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk selama tahun 2011-2014 tertinggi yaitu Kabupaten Bogor

dengan rata-rata selama empat tahun sebanyak lebih dari 5.000.000 penduduk. Pada tahun 2014 yaitu sebesar 5.331.149 jiwa dan terjadi peningkatan sebesar 219.380 jiwa dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 5.111.760 jiwa. Sedangkan untuk wilayah di Jawa Barat yang memiliki penduduk terendah adalah Kota Banjar yakni selama 2011-2014 hanya 187.519 jiwa dimana hal tersebut terjadi karena pemerintah Kota Banjar telah berhasil melakukan program pemerintah sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan. Tingkat kemiskinan Kota Banjar menurun setiap tahunnya. Atas dasar fenomena dari kabupaten/kota tersebut maka tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat bahkan kemiskinan kronis.

Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi dari regresi menunjukkan bahwa LPE memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat dengan nilai koefisien sebesar 1.501. Artinya, setiap ada perubahan dalam kenaikan angka LPE sebesar 1% maka tingkat kemiskinan di Jawa Barat akan meningkat sebesar 1.501%. Hasil regresi menunjukkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat periode 2011-2014. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 2. LPE dan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Periode Tahun 2011-2014

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat pada garis LPE pada tahun 2013 dengan persentase 6,34% dan menunjukkan penurunan sebesar 1,25% pada tahun 2014 dengan persentase LPE sebesar 5,09%. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut searah dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2013 dengan tingkat kemiskinan 9,61% dan menunjukkan penurunan sebesar 0,43% pada tahun 2014 dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 9,18%.

Fenomena penurunan tingkat kemiskinan tersebut merupakan hasil dari kinerja yang telah dilakukan oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. salah satunya dari Kota Bandung sebesar 4,69% selama tahun 2011-2014 dan terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 4,65% pada tahun 2014 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat kemiskinan 4,78% meskipun hanya terjadi penurunan sebesar 0,13%. Pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh tingginya kinerja ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Bandung terutama dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sehingga meningkatkan kinerja produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor dengan kontribusi tinggi terhadap perekonomian Bandung menurun, sebanyak 0,28 pada tahun 2011.

Kemudian Kabupaten Bekasi dan wilayah di Jawa Barat lain yang merupakan kawasan industri menjadi tempat dimana terjadi aktivitas produksi yang pesat. Tetapi karena berkurangnya jumlah perusahaan industri besar dan sedang di wilayah Bekasi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi melambat. Dari data badan pusat statistik pada tahun 2011 tercatat jumlah perusahaan industri lebih dari 200 perusahaan dan berkurang setiap tahunnya, hingga pada tahun 2014 tercatat 154 perusahaan industri yang ada di wilayah Bekasi.

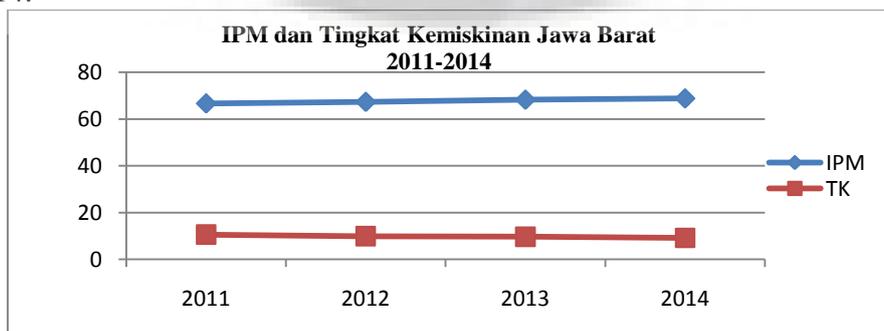
Sedangkan tingkat kemiskinan yang menurun di Jawa Barat tahun 2011-2014 ini terjadi karena program pemerintah mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat yang mengacu pada Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Presiden No.15 tahun 2010. Kebijakan ini mengatur secara teknis bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dapat mencapai target yang diharapkan yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 8 % pada tahun 2014.

Untuk mencapai target tersebut disusun strategi dasar untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yang dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa program yang terintegrasi seperti; 1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, yang dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan serta sanitasi dan air bersih. 2) Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan partisipatif keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, sehingga menguatkan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. 3) Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar dan meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.

Berdasarkan fenomena dari kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah dipaparkan maka sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa LPE merupakan hal yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah, yang dapat menunjang pembangunan. Akan tetapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian melambatnya LPE tidak mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Analisis Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Setelah dilakukan regresi maka hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Berikut adalah grafik IPM dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2011-2014.

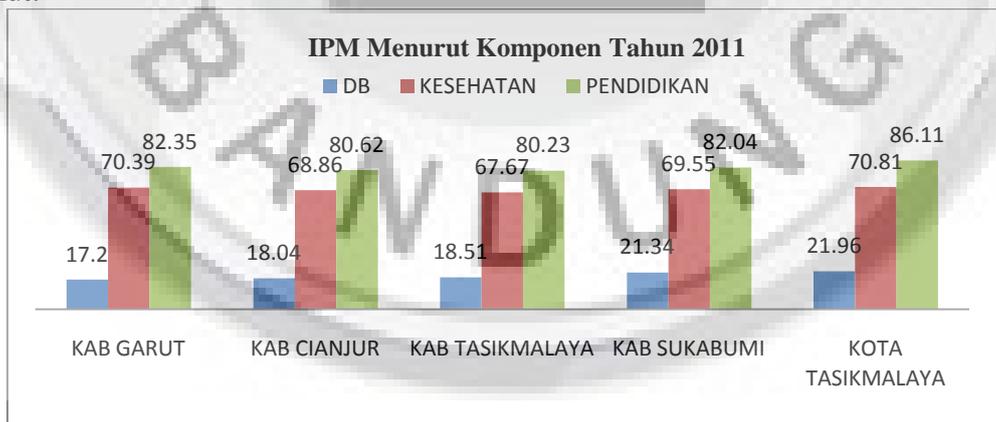


Gambar 3. IPM dan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat 2011-2014

Grafik di atas menunjukkan hubungan negatif antara IPM dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka IPM tahun 2014 yang mencapai 70% dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 yaitu sebesar 68,25%. Peningkatan IPM tersebut terlihat berlawanan dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 9,18% dan menunjukkan penurunan sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2013 sebesar 9,61%. Fenomena Jawa Barat tersebut terjadi karena kinerja yang telah dilakukan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, tetapi terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang memiliki angka IPM searah dengan tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,54% yang meningkat sebesar 0,72% dari tahun sebelumnya, diikuti dengan angka IPM yang juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,08%, menjadi 66,74% pada tahun 2013.

Begitu juga dengan Kabupaten Garut pada tahun 2013 yang tingkat kemiskinannya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,9%, menjadi 12,79%, yang diikuti dengan meningkatnya angka IPM sebesar 0,63%, menjadi 61,67% pada tahun 2013. Pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2013 Kabupaten Bandung mengalami peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,23% menjadi 4,78%, peningkatan kemiskinan ini juga diikuti dengan peningkatan IPM pada tahun 2013 sebesar 78,55% yang meningkat sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya. Atas dasar fenomena dari kabupaten/kota tersebut maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2014 tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa IPM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Selain itu, angka IPM Jawa Barat yang tinggi tidak berarti semua komponen pembentuk IPM memiliki angka yang tinggi. Angka IPM Jawa Barat yang tinggi ini disebabkan oleh komponen pendidikan dan komponen kesehatan yang persentasenya cukup tinggi, tetapi tidak dengan komponen daya beli. Dapat dilihat dari grafik berikut:

**Gambar 4.** IPM menurut komponen tahun 2011

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka komponen pendidikan dan komponen kesehatan lebih besar dibandingkan dengan komponen daya beli pada wilayah-wilayah Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa komponen pendidikan dan komponen kesehatan memiliki peran besar dalam tingginya angka IPM. Sehingga tidak berpengaruhnya IPM terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat disebabkan karena salah satu komponen IPM yaitu daya beli yang rendah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode tahun 2011-2014, pertumbuhan penduduk pada tingkat signifikansi 5% memberikan pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan Jawa Barat. Sehingga, setiap penambahan penduduk sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 1,56%. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh fertilitas dan migrasi yang tinggi di wilayah-wilayah penyangga ibukota. Sehingga di Jawa Barat pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Selama periode tahun 2011-2014, LPE pada tingkat signifikansi 5% memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Sehingga, setiap ada peningkatan LPE sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 1,50%. Tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa LPE berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, sedangkan menurunnya LPE disebabkan oleh beberapa wilayah di Jawa Barat yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Jawa Barat kinerja ekonominya menurun.
3. Sedangkan selama periode tahun 2011-2014 IPM pada tingkat signifikansi 5% hasil regresi menunjukkan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh salah satu komponen pembentuk IPM yaitu daya beli, yang memiliki persentase lebih rendah dibandingkan dengan komponen lain.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data dan Informasi Tingkat Kemiskinan Indonesia Berbagai Tahun*. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data dan Informasi Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data Jumlah Penduduk Jawa Barat*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data Indeks Pembangunan manusia Jawa Barat*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Data Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat 2011-2013*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Jhingan, M. L. 2008. *Ekonomi Pembanguna Dan Perencanaan*. Edisi 16. Alih Bahasa. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. 2016. *Data Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung

Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. 2015. *Data Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat*. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Bandung

Todaro, M. P and S. C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 11. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta

Todaro, M. P and S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta

